

Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
 Nama OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Tahun Penilaian : 2026
 Periode yang dinilai : 2025-2029
 Urusan Pemerintahan :

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PERNYATAAN RISIKO	TAHAP	KODE RISIKO	PEMILIK RISIKO	SEBAB	SUMBER	U/ C	DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan belum dapat meningkatkan PAD	Pelaksanaan	RSO.26373501	KEPALA-BADAN	Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku berdampak pada rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah	I	C	Tidak optimalnya penerimaan PAD	Provinsi Kalimantan Utara
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pemeriksaan pajak tidak akurat	Pelaksanaan	RSO.26373502	KEPALA-BADAN	Data wajib pajak yang tidak valid dan belum teintegras dengan data instansi vertikal	I	C	Potensi pajak dan retribusi daerah tidak tergali secara maksimal	Bapenda
3	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeriksaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Ketidaksesuaian data antar-sistem/aplikasi	Pelaksanaan	RSO.26373503	KEPALA-BADAN	Integrasi sistem belum optimal dan pembaruan data tidak serentak	E	C	Laporan pajak tidak andal dan menimbulkan koreksi pemeriksaan	Bapenda
4	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai menjadi Non Tunai	Gangguan atau kegagalan sistem pembayaran non tunai	Pelaporan	RSO.26373504	KEPALA-BADAN	Infrastruktur teknologi tidak andal atau ketergantungan pada pihak ketiga (perbankan/payment gateway)	E	C	Terhambatnya proses pembayaran pajak dan menurunnya kepercayaan wajib pajak	Bapenda
5	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Penolakan atau ketidakpatuhan wajib pajak	Pelaksanaan	RSO.26373505	KEPALA-BADAN	Penagihan tidak disertai pendekatan persuasif dan penegakan sanksi yang konsisten	E	C	Rendahnya tingkat kepatuhan dan berkurangnya PAD	Bapenda
6	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Data objek dan wajib pajak tidak akurat	Pelaksanaan	RSO.26373506	KEPALA-BADAN	Proses validasi dan pemutakhiran data tidak berjalan rutin	I	C	Penetapan pajak keliru dan potensi kehilangan penerimaan	Bapenda
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Penyimpangan dalam pelaksanaan pemeriksaan	Pelaksanaan	RSO.26373507	KEPALA-BADAN	Lemahnya pengendalian internal dan integritas petugas	I	C	Kerugian daerah dan menurunnya kepercayaan publik	Provinsi Kalimantan Utara
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Hasil pelatihan tidak diterapkan	Pelaksanaan	RSO.26373508	KEPALA-BADAN	Tidak ada evaluasi dan tindak lanjut pascapelatihan	I	C	Kinerja organisasi tidak mengalami perbaikan	Bapenda
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
9	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Penurunan kinerja sistem/aplikasi	Pelaksanaan	RSO.26373509	KEPALA-BADAN	Pemeliharaan dan pembaruan tidak rutin	I	C	Layanan publik terganggu dan produktivitas menurun	Masyarakat Kalimantan Utara
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja										

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Nama OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH
Tahun Penilaian : 2026
Periode yang dinilai : 2025-2029
Urusan Pemerintahan :

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PERNYATAAN RISIKO	TAHAP	KODE RISIKO	PEMILIK RISIKO	SEBAB	SUMBER	U/ C	DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA
	Perangkat Daerah										
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai standar regualsi	Evaluasi kinerja tidak objektif	Pelaporan	RSO.26373510	KEPALA-BADAN	Indikator kinerja tidak terukur atau data tidak andal	I	C	Pengambilan kebijakan tidak tepat	Bapenda